

Semiotika Akuntabilitas Permakultur: Kolaborasi Konsep Sustainability Accounting dan Sustainable Agriculture menuju Sustainable Tourism

Semiotics of Permaculture Accountability: Collaboration of Sustainability Accounting and Sustainable Agriculture Concepts towards Sustainable Tourism

I Gusti Ayu Agung Omika Dewi^{1✉}, I Gusti Ngurah Santosa², I Gusti Ayu Agung Dian Susanthi³, I Gusti Ayu Agung Sintha Satwika⁴,
 I Gusti Ayu Agung Dewi Kurnia Uthami⁵

¹Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia.

²Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

³Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia.

⁴Universitas Mahasaraswati, Bali, Indonesia.

⁵Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

✉Corresponding author: omikadewi@undiknas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi suatu konsep akuntabilitas yang lebih holistik dengan mengkolaborasikan konsep *Sustainability Accounting* dan *Sustainable Agriculture* dalam upaya menuju *Sustainable Tourism* di Bali. Konstruksi konsep akuntabilitas penting untuk dilakukan, karena konsep akuntabilitas yang ada saat ini lebih banyak mengacu pada pemikiran Barat seperti "*Triple Bottom Line*" maupun "*Pentuple Bottom Line*" yang belum tentu sesuai dengan karakteristik pariwisata Bali. Konsep akuntabilitas yang berasal dari pemikiran Barat, dinilai belum sepenuhnya holistik karena belum terdapat dimensi spiritual (Tuhan). Konstruksi konsep Akuntabilitas Permakultur yang lebih holistik sebagai bentuk kolaborasi antara konsep *Sustainability Accounting* dan *Sustainable Agriculture*, diharapkan dapat mengantarkan pariwisata Bali menuju *Sustainable Tourism*. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu konsep Akuntabilitas Permakultur mungkin hanya sesuai diterapkan untuk konteks pariwisata Bali.

Abstract

This research aims to construct a more holistic concept of accountability by collaborating the concepts of Sustainability Accounting and Sustainable Agriculture in an effort towards Sustainable Tourism in Bali. The construction of the concept of accountability is important to do, because the current concept of accountability refers more to Western thinking such as the "Triple Bottom Line" and the "Pentuple Bottom Line" which are not necessarily in accordance with the characteristics of Balinese tourism. The concept of accountability, which originates from Western thought, is considered not fully holistic because there is no spiritual dimension (God) yet. The construction of a more holistic Permaculture Accountability concept as a form of collaboration between the concepts of Sustainability Accounting and Sustainable Agriculture, is expected to lead Bali tourism towards Sustainable Tourism. This research has limitations, namely the concept of Permaculture Accountability may only be suitable to be applied to the context of Bali tourism.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 I Gusti Ayu Agung Omika Dewi, I Gusti Ngurah Santosa, I Gusti Ayu Agung Dian Susanthi, I Gusti Ayu Agung Sintha Satwika, I Gusti Ayu Agung Dewi Kurnia Uthami.

Article history

Received 2025-05-14

Accepted 2025-06-30

Published 2025-07-11

Kata kunci

Akuntabilitas
 Permakultur;
 Semiotika-Konstruktif;
Sustainability Accounting;
Sustainable Agriculture;
Sustainable Tourism.

Keywords

Permaculture
 Accountability;
 Semiotic-Constructive,
Sustainability Accounting;
Sustainable Agriculture;
Sustainable Tourism.

1. Pendahuluan

Sejak dahulu kala, Pulau Bali memang sudah dikenal dengan sejumlah daya tarik seperti keindahan panorama alamnya, keunikan budaya dan adat-istiadatnya, keragaman kesenian tradisionalnya, keramah-tamahan masyarakatnya, serta sajian kulinernya yang begitu menggugah selera. Berbagai daya tarik yang dimiliki Pulau Bali, membuat Bali mendapatkan berbagai sebutan dari para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, seperti: Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, *The Island Of Paradise* serta berbagai sebutan lainnya untuk mendeskripsikan keunikan dan keindahan Pulau Bali. Hingga saat ini, Bali masih menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling diminati oleh para wisatawan. Pariwisata Bali dengan berbagai daya tariknya yang sudah begitu dikenal di kalangan para wisatawan domestik maupun mancanegara membuat semakin derasnya kunjungan para wisatawan untuk menikmati keunikan dan keindahan Pulau Dewata Bali. Kunjungan wisatawan asing dari berbagai negara dan wisatawan domestik dari berbagai daerah dengan membawa serta konsep pemikiran dan kebudayaan mereka masing-masing mengakibatkan adanya perubahan konsep pemikiran masyarakat Bali seiring adanya pergeseran pada tatanan budaya Bali (Dewi et al., 2022).

Menurut catatan sejarah, pariwisata Bali mulai berkembang begitu pesat pada tahun 1930-an dengan destinasi pariwisata yang masih terbatas. Pariwisata Bali terus-menerus mengalami perkembangan hingga saat ini telah memiliki begitu banyak destinasi wisata. Jika dilakukan penelusuran kembali, sebagian besar destinasi pariwisata Bali adalah berupa wisata alam, seperti pantai, danau, sawah, gunung, bukit, pedesaan dan sebagainya termasuk kehidupan budaya, adat-istiadat, dan kesenian tradisional Bali. Adanya fasilitas wisata seperti villa, restoran, hotel, serta bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas lainnya pada dasarnya berperan untuk melengkapi kebutuhan para wisatawan saat mengunjungi tempat wisata (Dewi, 2025). Perkembangan teknologi yang begitu pesat seiring perkembangan zaman, membuat para wisatawan semakin antusias untuk berwisata ke Pulau Bali. Sebagai upaya menyambut derasnya kunjungan wisatawan, industri berbasis pariwisata di Bali semakin menjamur yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang dinilai dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata Bali (*Sustainable Tourism*).

Permasalahan terkait ancaman terhadap *Sustainable Tourism* di Bali menjadi semakin serius ketika di akhir tahun 2024, Bali diguncang oleh isu *overtourism*. Bali dimasukkan oleh Fodor (sebuah agen perjalanan wisata Amerika Serikat) ke dalam daftar sebagai salah satu destinasi pariwisata yang tidak direkomendasikan untuk dikunjungi di tahun 2025 (CNNIndonesia, 2024). Berbagai persoalan yang muncul akibat isu *overtourism* di Bali bukan hanya tentang kelestarian alam Bali yang terganggu, tapi juga mengenai hubungan sosial-budaya di kalangan masyarakat Bali yang merenggang. Persoalan menjadi semakin parah ketika berbagai kegiatan spiritual keagamaan sebagai jati diri masyarakat Bali yang beragama, berbudaya dan religius sudah mulai terusik. Menurut pandangan banyak pihak, penyebab munculnya berbagai persoalan akibat isu *overtourism* di Bali adalah karena konsep pemikiran oknum pengelola bisnis pariwisata Bali yang telah tercemari oleh konsep pemikiran barat. Tentu saja, cara berpikir barat akan cenderung mengarah pada kapitalisme, neo-liberalisme bahkan neo-kolonialisme. Kondisi ini menyebabkan timbulnya tindakan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya pariwisata Bali yang sudah dapat dipastikan akan bisa mengganggu *Sustainable Tourism* di Bali (Dewi, 2025). Oknum pengelola pariwisata Bali yang pemikirannya dikuasai konsep barat cenderung tidak akan mau bertanggung-jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang semena-mena terhadap pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata Bali.

Isu *overtourism* bisa semakin menjadi-jadi jika cara berpikir barat masih mendominasi konsep pemikiran oknum pengelola pariwisata Bali, sehingga mereka tidak akan merasa bersalah ketika memanipulasi laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dimana fokus perhatian entitas wisata yang mereka kelola lebih mengarah pada dimensi ekonomi. Situasi ini mengakibatkan distribusi pendapatan pariwisata Bali menjadi tidak merata karena hanya dinikmati oleh segelintir oknum tertentu yang mengarah pada tindakan pemaksimalan laba. Padahal seharusnya

pendapatan pariwisata Bali dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Kondisi ini selanjutnya memicu adanya tuntutan agar entitas pariwisata Bali menjadi lebih bertanggungjawab, sehingga penting untuk menginisiasi suatu konsep akuntabilitas yang lebih “adil” dan “holistik”. Menurut Triyuwono (2016), akuntabilitas yang fokus perhatiannya lebih kepada maksimalisasi profit menandakan bahwa kesejahteraan pada suatu perusahaan (entitas) hanya dapat dirasakan oleh para pemilik modal (kreditur dan investor) serta pihak manajemen serta cenderung tidak memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya (karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat) termasuk lingkungan alam. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya dari konsep akuntabilitas, yaitu berupaya agar perbedaan kepentingan *stakeholder* dapat terakomodasi.

Oknum pengelola pariwisata Bali yang melakukan manipulasi melalui media “akuntabilitas” seringkali menggunakan akuntansi keberlanjutan (*Sustainability Accounting*) sebagai kamuflase agar mereka seakan-akan peduli pada dampak lingkungan dan sosial akibat berbagai aktivitas di sektor pariwisata. Padahal, jika dilakukan penelusuran secara lebih mendalam informasi yang disajikan dalam laporan tahunan (*Annual Report*) atau laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) seringkali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pariwisata Bali yang sebenarnya. Akuntansi keberlanjutan yang semestinya dapat berperan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholder* melalui mekanisme pelaporan informasi baik keuangan (terkait dana *Corporate Social Responsibility*) maupun non keuangan, bisa berubah tujuannya menjadi lebih memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal (*capitalist*) daripada *stakeholders* (Dewi, 2010). Hal ini selanjutnya menimbulkan adanya tuntutan agar entitas pariwisata bisa lebih memperluas cakupan akuntabilitasnya dengan tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi semata, namun juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Akuntabilitas dalam praktiknya sering dihubungkan dengan *Sustainability Accounting* yang mengacu pada konsep “*Triple Bottom Line*” sebagaimana digagas oleh Elkington (1998) yang dijabarkan melalui 3P yakni “*Profit*” (Ekonomi), “*People*” (Sosial), dan “*Planet*” (Lingkungan) sebagai upaya menuju *Sustainable Tourism* di Bali. Namun, Elkington (2018) menarik kembali konsep “*Triple Bottom Line*” (3P) tersebut dan menggantinya dengan “*Pentuple Bottom Line*” (5P) yang terdiri dari “*Planet*”, “*People*”, “*Prosperity*”, “*Partnership*” dan “*Peace*”. Penggunaan konsep “*Triple Bottom Line*” (3P) dan “*Pentuple Bottom Line*” (5P) secara global dinilai telah dapat menuai suatu keberhasilan. Namun, *Sustainability Accounting* sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan profitabilitas, stabilitas, dan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan kehadiran dimensi spiritual (Tuhan), sehingga konsep “*Triple Bottom Line*” dan “*Pentuple Bottom Line*” sebenarnya kurang tepat untuk digunakan dalam konteks pariwisata Bali. Padahal pariwisata Bali sangatlah identik dengan dimensi spiritual sebagai “jiwa” yang mendasari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan alam. Ketidadaan dimensi spiritual mengindikasikan bahwa akuntabilitas pada entitas pariwisata Bali masih mengandung *value* kapitalisme, neo-liberalisme, neo-kolonialisme serta unsur ketidakadilan demi mengedepankan kesejahteraan bagi *shareholders* semata (Dewi, 2025).

Kondisi ketidadaan dimensi spiritualitas dipandang dapat membuat perjalanan menuju *Sustainable Tourism* di Bali tidak bisa berjalan lancar. Praktik akuntabilitas tanpa dilandasi dimensi spiritual dalam perkembangan selanjutnya semakin diragukan kemampuannya dalam mewujudkan *Sustainable Tourism*. Salah satu penyebab keraguan tersebut adalah pengelolaan pariwisata Bali seringkali melupakan sektor pertanian yang telah ada di Bali sejak ribuan tahun silam. Padahal, keberadaan pariwisata Bali diawali dengan adanya sektor pertanian yang bisa ditelusuri melalui sistem pengairan Bali yaitu Subak yang sudah ada sejak abad ke-9 Masehi (Windia, 2006). Jika pariwisata Bali ingin tetap dipertahankan, maka sektor pertanian juga harus tetap dijaga melalui konsep *Sustainable Agriculture*. Di Bali, *Sustainable Agriculture* terkait erat dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Bali yang berlandaskan *Tri Hita Karana* (THK). Menurut Wiana (2007), pengertian THK adalah tiga penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan yang bersumber dari keharmonisan hubungan antara: (1) Manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*); (2). Manusia dengan sesamanya (*Pawongan*); dan (3). Manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Oleh sebab itu, THK sebagai filosofi hidup masyarakat Bali penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam praktik

akuntabilitas dengan mengolaborasi *Sustainability Accounting* dan *Sustainable Agriculture* dalam upaya mewujudkan *Sustainable Tourism* di Bali.

Riset-riset terdahulu mengenai akuntabilitas yang dikaitkan dengan *Sustainability Accounting*, *Sustainable Agriculture* dan *Sustainable Tourism* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dewi (2010) mengklasifikasikan realitas “sustainability” dalam praktik *Sustainability Reporting* menjadi *Pseudo Sustainability*, *Obligatory Sustainability*, dan *Humanism Sustainability*. Sutawa (2012) menemukan bahwa *Sustainable Tourism* bisa terwujud melalui pemberdayaan masyarakat guna menjaga alam dan budaya. Sudana et al., (2014) menemukan pemikiran filosofis tentang *Sustainable Development* sebagai landasan *Sustainability Accounting*. Desbiolles, (2018) menemukan bahwa *Sustainability Accounting* untuk mengelola pariwisata hendaknya diseimbangkan antara keadilan, batasan ekologis, dan kemaslahatan manusia demi mewujudkan *Sustainable Tourism*. Shereni (2019) menemukan bahwa *Sustainable Tourism* masih dalam tahap awal di negara-negara Afrika sub-Sahara yang dinilai bisa berkontribusi bagi pelestarian lingkungan. Jaremen et al. (2019) menemukan bahwa industri pariwisata dapat memberikan efek positif maupun negatif terhadap *Sustainable Tourism*. (Dewi, 2021) menemukan konsep “Ekosentrisme Religius” sebagai sebuah metodologi akuntabilitas baru yang dinilai mampu membangkitkan kesadaran manusia sehingga penerapan *Sustainability Accounting* dapat berlandaskan pada rasa kasih sayang tak terbatas bagi seluruh makhluk Tuhan. Berdasarkan riset-riset terdahulu dapat diketahui berbagai konsep dan teori yang dapat dijadikan sebagai pijakan konseptual dalam mengkaji konsep akuntabilitas.

1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas sangatlah diperlukan bagi tiap-tiap organisasi, baik publik maupun privat, karena masing-masing organisasi memiliki kewajiban untuk dapat mengelola hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Akuntabilitas bisa menggambarkan suatu bentuk tanggung jawab, hak serta kewajiban suatu entitas menurut tindakan interpersonal, struktural yang sesuai kontinjensi sosial, dalam konteks tertentu (Lehman, 2005; Gelfand et al., 2004). Akuntabilitas perusahaan dewasa ini tidaklah hanya terbatas pada tanggung jawab keuangan semata, namun juga tanggung jawab sosial (Rahman & Kusumawardani, 2025). Akuntabilitas dapat tercapai apabila beberapa kriteria terpenuhi, yaitu: partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak bagi mereka, peran pemangku kepentingan dalam mendefinisikan isi laporan keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui penyampaian pendapat mereka tentang keberlanjutan perusahaan (Ardiana, 2023). Menurut Gray et al., (2006), akuntabilitas dapat dijabarkan sebagai hak masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antar individu, organisasi serta masyarakat.

Akuntabilitas bisa dipahami sebagai wujud tanggungjawab suatu entitas untuk mengelola sumber daya tertentu, yang dirumuskan dalam suatu perjanjian (Syah et al., 2020). Jika dilihat dari kaca mata budaya, akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai harapan individu atau organisasi yang diselaraskan dalam suatu sistem sosial, sehingga dapat mengantisipasi adanya konsekuensi terjadinya penyimpangan. Akuntabilitas jika dikaji dalam dimensi budaya dinilai memiliki sistem yang dapat mewujudkan suatu kepastian, ketertiban, dan suatu kontrol yang sangat bergantung pada budaya yang melingkupinya (Dewi, 2025). Jadi, dalam kondisi ini, tiap individu dan organisasi sebaiknya bisa sepakat untuk mewujudkan tujuan yang dapat menyelaraskan kepentingan individu, organisasi, kelompok, serta masyarakat. Akuntabilitas, dalam bingkai budaya Bali dapat dikatakan sarat dengan nilai-nilai spiritualitas yang tentu saja memerlukan acuan yang tepat agar praktik akuntabilitas dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan stakeholder dan masyarakat Bali seluruhnya.

1.2. Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*)

Akuntansi keberlanjutan secara konvensional, sering dinilai sebagai bagian dari akuntansi keuangan yang terutama berfokus pada pelaporan informasi dan kinerja non-finansial kepada *stakeholder* yang meliputi *stakeholder* internal dan eksternal (Sukoharsono & Andayani, 2021). Akuntansi keberlanjutan dewasa ini sering dipahami sebagai sarana yang digunakan perusahaan agar tampak bertanggungjawab dan lebih berkelanjutan. *Sustainability Accounting* didefinisikan

sebagai praktik dan kebijakan akuntansi baru yang mengacu pada konsep keberlanjutan yang memegang peranan penting dalam agenda (Lamberton, 2005). Hubungan antara Sustainable Development dengan akuntansi didasarkan pada kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dan sosial yang dipengaruhi oleh kegiatan bisnis dan industri (Bebbington & Larrinaga, 2014). Sustainability Accounting yang dinilai berkaitan erat dengan CSR, merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan dan menumbuhkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat (Bagiada et al., 2025).

Sustainability Accounting yang sering diidentikkan dengan CSR telah berupaya melibatkan sebagian atau seluruh stakeholder baik pada perusahaan besar, sedang maupun kecil (Wiriattmaja et al., 2024). *Sustainability Accounting* yang dikenal juga dengan istilah akuntansi lingkungan, akuntansi sosial, pelaporan tanggung jawab sosial, pelaporan sosial, atau pelaporan non-finansial merupakan suatu proses penyampaian informasi terkait dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan bisnis (Sukoharsono et al., 2021). Perkembangan *Sustainability Accounting* mengakibatkan terjadinya reformasi terkait format pelaporan akuntansi keuangan dan akuntansi keberlanjutan yang mencakup manajemen keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, tata kelola keberlanjutan dan pelaporan keberlanjutan, yang terangkum dalam suatu bentuk *Integrated Reporting*. Implementasi *Sustainability Accounting* yang dinilai sejalan dengan semangat *Sustainable Development*, memunculkan kekhawatiran dari (Gray, 2010) mengenai penerapan *Sustainability Accounting* apakah benar-benar memperhitungkan keberlanjutan? Kekhawatiran tersebut muncul karena berbagai perkembangan tersebut belumlah bisa menyediakan konsep yang sesuai konteks studi ini, sehingga perlu dilakukan konstruksi terkait konsep akuntabilitas yang lebih sesuai karakteristik Pariwisata Bali.

1.3. Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) dan Konsep Permakultur

Salah satu sektor yang memiliki peranan yang begitu penting dalam suatu negara adalah sektor pertanian, karena dapat memastikan ketahanan pangan dalam suatu negara. Menyadari pentingnya sektor pertanian, pemerintah di negara-negara berkembang telah secara aktif melakukan reformasi dalam sistem pertanian mereka antara lain melalui penyuluhan pertanian guna memenuhi kebutuhan informasi dan pembelajaran para petani dan masyarakat pedesaan (Karubanga et al., 2024). Pemerintah di negara-negara Uni-Eropa juga telah bersepakat melalui “The Green Deal” yang bertujuan untuk menjadikan pertanian lebih hijau, lebih berkelanjutan, lebih layak dan berkontribusi dalam membatasi emisi gas rumah kaca (Aleksandrova-Zlatanska et al., 2025).

Sektor pertanian di Bali dinilai sebagai industri terpenting kedua setelah pariwisata. Berbeda dengan sektor pariwisata yang rentan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan gangguan alam, pertanian merupakan sektor yang tangguh terhadap gangguan ini (Hirakawa et al., 2024). Sektor pertanian dipercaya dapat menopang sektor pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Bahkan, sektor pariwisata dinilai dapat menjadi penopang perekonomian Bali di saat sektor pariwisata mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 yang lalu. Oleh sebab itu, penting untuk tetap menjaga sektor pertanian melalui konsep Sustainable Agriculture sebagai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor pertanian. Sustainable Agriculture bisa dimaknai sebagai prosedur pengelolaan yang memanfaatkan proses alam untuk melestarikan sumber daya, meminimalkan limbah dan dampak lingkungan, meningkatkan ketahanan agroekosistem, pengaturan mandiri, serta evolusi dan produksi berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan semua orang (Velten et al., 2015).

Sustainable Agriculture memiliki keterkaitan erat dengan konsep pemikiran Permakultur yang diadaptasi dari bidang ilmu pertanian multidisiplin. Istilah Permakultur diadaptasi dari sistem pertanian seperti digagas David Holmren dan Bill Mollison pada tahun 1970-an sebagai bentuk dedikasi pada penggunaan lahan yang berkelanjutan. Gagasan mengenai Permakultur ini memang baru dimunculkan di tahun 1970-an, namun inti dari Permakultur ini sebenarnya telah ada di Bali sejak ribuan tahun silam yang bisa ditelusuri melalui sistem pengairan pada pertanian di Bali yang dikenal sebagai Subak. Gagasan mengenai Permakultur muncul karena sebelum pariwisata Bali dikenal luas, sektor pertanianlah yang awalnya menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Bali. Bahkan sistem irigasi untuk pertanian Bali yang dikenal sebagai Subak sudah ada

sejak abad ke-9 Masehi yang juga berlandaskan filosofi THK (Windia, 2006). Pemikiran Permakultur merupakan antitesis dari pemikiran Monokultur yang melegalkan tindakan eksploitasi oleh perusahaan atau organisasi yang cenderung merusak lingkungan serta mengganggu keseimbangan tatanan alam. Di sisi lain, pemikiran Permakultur, dilandasi oleh upaya perusahaan dalam memelihara kelestarian lingkungan serta menjaga tatanan alam. Pemikiran Permakultur dipandang dapat menjaga harmonisasi lingkungan alam dan manusia secara seimbang dan berkelanjutan (Dewi, 2025).

1.4. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Sustainable Tourism merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa mendatang. WTO dan United Nations Environment Programme juga telah merumuskan sedikitnya 12 tujuan utama pengembangan *Sustainable Tourism*, meliputi: (1) kelayakan ekonomi; (2) kemakmuran masyarakat setempat; (3) kualitas lapangan kerja; (4) pemerataan sosial; (5) pemenuhan kebutuhan pengunjung; (6) pengendalian setempat; (7) kesejahteraan masyarakat; (8) kekayaan budaya; (9) integritas fisik; (10) keanekaragaman hayati; (11) efisiensi sumber daya; (12) kemurnian lingkungan.

Sementara itu, terdapat 4 (empat) pilar utama dalam pembangunan pariwisata, terkait Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang meliputi: (1) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (*sustainability management*); (2) pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal (*social-economy*); (3) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (*culture*); dan (4) pelestarian lingkungan (*environment*) (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14, 2016). Keempat pilar ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

1.5. *Tri Hita Karana*

Tri Hita Karana adalah salah satu warisan filosofi hidup yang sering dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat Bali. *Tri Hita Karana* memang sudah dikenal luas secara turun temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Bali. *Tri Hita Karana* secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga kata, yaitu *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya bahagia atau sejahtera, dan *Karana* artinya penyebab. Menurut Wiana (2007), *Tri Hita Karana* dapat diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan yang bersumber dari keharmonisan hubungan antara: (1) manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*); (2). manusia dengan sesamanya (*Pawongan*); dan (3). manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Tujuan dari filosofi *Tri Hita Karana* adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama lahir dan batin dengan menjaga keharmonisan dalam dimensi hubungan spiritual, sosial dan lingkungan secara seimbang.

Konsep *Tri Hita Karana* pertama kali digagas di ruang publik secara akademik pada 11 November 1966, di Universitas Dwijendra Denpasar melalui Konferensi Regional I Dewan Perjuangan Hindu Bali. Tujuan konferensi tersebut adalah menggugah kesadaran masyarakat Bali untuk dapat menunjukkan peran dalam pembangunan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. *Tri Hita Karana* dalam konteks *sustainability* memiliki keterkaitan erat dimana *Pawongan* terkoneksi dengan dimensi sosial, dan *Palemahan* terkoneksi dengan dimensi lingkungan. Dimensi sosial (*Pawongan*) maupun dimensi lingkungan (*Palemahan*) selalu berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*) sebagai dimensi spiritual. Jadi, masyarakat Bali sebenarnya sejak lama telah memiliki konsep keberlanjutan yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* yang benar-benar berasal dari akar budaya Bali.

2. Metode

Pemahaman terhadap paradigma penelitian memiliki peran penting dalam penentuan metode yang tepat untuk penelitian yang akan dilakukan. Paradigma menurut (Triyuwono, 2000) bisa dipandang sebagai media untuk membingkai realitas praktik dan ilmu akuntansi, sekaligus sebagai alat untuk tidak melihat, yang harus disadari bahwa paradigma akan selalu berkembang melalui

proses dialektika untuk menuju kesempurnaan. Paradigma dapat dipahami sebagai cara pandang terhadap realita, dunia, atau ilmu (bahkan akuntansi) melalui asumsi fundamental tentang manusia, alam, semesta, dan Tuhan (Kamayanti, 2021). Dalam akuntansi secara umum, dikenal empat paradigma, yang meliputi: "*The Functionalist Paradigm*", "*The Interpretive Paradigm*", "*The Critical Paradigm*", dan "*The Postmodernism Paradigm*" (Muhadjir, 2000). Menurut Triyuwono (2020) ketika memberikan pembelajaran Filsafat Ilmu, paradigma penelitian akuntansi telah berkembang menjadi 7 paradigma, yakni: (1) Paradigma Positivisme, (2) Paradigma Interpretivisme, (3) Paradigma Kritisme, (4) Paradigma Posmodernisme, (5) Paradigma Religionisme, (6) Paradigma Spiritualisme, serta (7) Paradigma Ilahi. Mulawarman (2021), juga menggagas suatu paradigma penelitian yang disebut sebagai Paradigma Nusantara, yang bertujuan mengarahkan ilmu pengetahuan nusantara sebagai *lifeworld* bagi masyarakat nusantara.

Adanya beragam pandangan ataupun perspektif yang berperan menjadi landasan atau dasar keyakinan dalam penelitian akuntansi disebut sebagai multiparadigma. Keberadaan multiparadigma dalam penelitian akuntansi, dapat dikatakan sebagai suatu keniscayaan, karena multiparadigma dinilai dapat menciptakan berbagai keragaman hasil-hasil penelitian guna memperkaya khasanah keilmuan akuntansi. Mengingat adanya berbagai karakter dari paradigma penelitian, peneliti memandang bahwa penting untuk memosisikan diri dalam suatu paradigma penelitian yang benar-benar bisa menuntun proses penelitian yang dapat merefleksikan tujuan penelitian. Menurut Sukoharsono (2018), penelitian yang menggunakan paradigma posmodernisme dipandang dapat membantu peneliti dalam mengemukakan ide-ide sesuai realitas yang bisa diamati maupun yang tidak. Penggunaan paradigma posmodernisme dalam penelitian ini dipandang dapat membantu proses internalisasi unsur "*sang lain*" (*the others*) yang termarginalkan oleh modernisme sehingga bisa mendapatkan posisi yang serupa dengan modernisme.

Posmodernisme secara metodologis melihat realitas bersifat majemuk, yang merupakan suatu kesatuan dari hasil pengalaman obyektif dan subyektif, spiritual dan intuitif. Menurut pandangan posmodernisme, manusia dipandang sebagai makhluk dinamis, holistik serta bebas, dimana tidak ada pemisahan antara pencipta realitas (*subject*) dengan realitas (*object*) (Mulawarman, 2013). Akuntansi dalam bingkai posmodernisme digambarkan secara teknis bisa menangkap arus perhitungan uang secara super *symbolic*. Artinya, keberadaan teknologi menyebabkan proses kalkulasi kekayaan dapat ditransformasikan dalam simbol-simbol yang secara fisik tidak terlihat sebagai kekayaan (seperti kartu debit, kartu kredit dan sebagainya), namun dapat pula ditransformasikan dalam pulsa-pulsa elektronik yang setiap waktu bisa menerima dan memberi informasi.

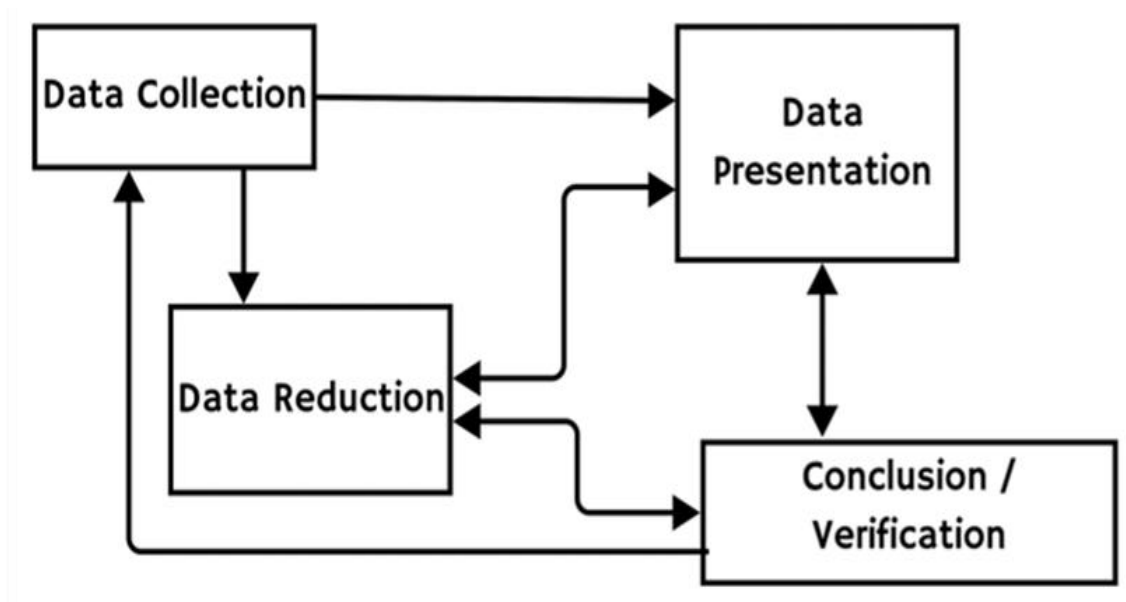
Triyuwono (2000) menjelaskan posmodernisme sebagai sarana untuk mengkonstruksi atau mendekonstruksi ilmu pengetahuan akuntansi yang mengandung nilai modernisme yang membelenggu lokalitas dan agama dalam konteks harmonisasinya dengan akuntansi yang tunggal. Padahal, pada kenyataannya akuntansi tidaklah tunggal karena tidak memiliki sifat filosofis, sosiologis, dan kultural yang cenderung sama (Rosenau, 1992). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa seharusnya tidak ada kooptasi oleh Akuntansi "*Barat*", sehingga harus dikonstruksi atau didekonstruksi sedemikian rupa agar bisa sesuai dengan realitas empirisnya. Menurut pandangan posmodernisme "*Barat*", realitas dapat dijelaskan sebagai asumsi tentang teks, teori, pembaca, penulis, subyek, dan sejarah. Paradigma posmodernisme menjabarkan bahwa tujuan diperolehnya kebenaran bukan merupakan perspektif tujuan utama keberadaan ilmu. Oleh karena itu, paradigma posmodernisme tidak menyetujui adanya teori karena keberadaan teori pada dasarnya merefleksikan kebenaran dimana dalam konteks ilmu sosial kebenaran memiliki sifat yang sangat teoritikal. Posmodernisme memandang kebenaran sebagai pluralitas, sehingga posmodernisme tidak menyetujui semua klaim monopolistik tentang kebenaran.

Salah satu tokoh posmodernisme sangat terkenal adalah Derrida yang dikenal dengan terminologi dekonstruksi realitas modern dalam rangka keluar dari logosentrisme, yang mengklaim legitimasi dengan merujuk pada kebenaran universal dan eksternal. Pandangan posmodernisme Derrida melihat realitas dan hubungan-hubungan dalam realitas sebagai titik sentral bahwa realitas sosial dan ilmiah tidak memiliki batas (Mulawarman, 2019). Dekonstruksi Derrida berfokus pada hal-hal kecil yang tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran. Proses dekonstruksi untuk

menemukan kebenaran terjadi secara terus-menerus agar dapat memberi jalan bagi dekonstruksi selanjutnya tanpa menghancurkan yang terendah dan tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran. Postmodernisme digambarkan oleh Triyuwono (2016) sebagai instrumen untuk mendekonstruksi nilai-nilai modernisme dalam disiplin ilmu akuntansi. Akuntansi "Barat" tidak boleh dikooptasi tetapi harus didekonstruksi sedemikian rupa, sesuai dengan realitas empirisnya.

Melihat kondisi identiknya pandangan posmodernisme dengan cara berpikir "Barat", maka penting untuk memposisikan pijakan paradigma penelitian yang lebih sesuai konsep berpikir "Bali". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupaya mencari kedalaman dari sebuah permasalahan (Dewi, 2021) dengan mengkonstruksi konsep akuntabilitas yang melampaui dekonstruksi Derrida menggunakan pendekatan paradigma beyond posmodernisme berlandaskan pada konsep kemikiran "Bali". Proses konstruksi dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai budaya Bali berbasis filosofi Tri Hita Karana, mengingat bahwa riset-riset terdahulu secara spesifik masih belum berkarakter lokal dan belum berpihak pada realitas lokal. Berdasarkan penjabaran mengenai paradigma penelitian, maka penelitian ini berupaya melakukan konstruksi konsep akuntabilitas dengan mengolaborasi konsep Sustainability Accounting, Sustainable Agriculture guna mewujudkan Sustainable Tourism di Bali.

Peneliti melihat bahwa acuan yang dipergunakan untuk melakukan konstruksi konsep akuntabilitas sesuai pandangan *beyond* posmodernisme "Bali" adalah nilai-nilai budaya Bali yang berasal dari filosofi *Tri Hita Karana* agar sesuai dengan karakteristik pariwisata Bali. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan 3 informan kunci yang meliputi: Direktur Utama *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) Nusa Dua Bali, perwakilan pemerintah Bali, dan tokoh masyarakat setempat. Informan tersebut dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang mendalam terkait lokasi penelitian dan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan ITDC tahun 2023 (AR ITDC, 2023) dan Laporan PKBL ITDC (Laporan Audit PKBL, 2023] di kawasan pariwisata Nusa Dua Bali yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan analisis data model interaktif dalam penelitian kualitatif (Miles, M. B. dan Huberman, 1994) (seperti terlihat pada gambar 1).



Gambar 1. Model Interaktif dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Miles and Huberman (1994)

Penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan proses analisis data melalui tiga tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Model interaktif berarti bahwa tahapan-tahapan dalam analisis data dilakukan secara terus-menerus dan berulang serta dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam proses tersebut dilakukan melalui pengkodean, yaitu (1) *open coding* (diulang beberapa kali dibantu dengan penulisan memo analisis); (2) *axial coding* (data direduksi berdasarkan kategori tertentu). Tahap selanjutnya adalah mengkonstruksi konsep akuntabilitas menggunakan metode Semiotika-Konstruktif seperti yang dilakukan oleh Ridwan (2010) yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengungkapkan semiotika struktural pada tingkat mikro melalui penafsiran informan atas konsep akuntabilitas. Kedua, mengungkapkan semiotika struktural pada tingkat makro oleh peneliti dengan berfokus pada penafsiran informan atas konsep akuntabilitas sebagai konsep baru. Ketiga, mengungkapkan semiotika konstruksi oleh peneliti yang bertujuan untuk memahami makna sebuah teks berdasarkan realitas yang tampak dan tidak tampak. Keempat, penyampaian hasil semiotika-konstruktif atas "teks" secara retorik yang berupa uraian naratif. Pada tahap akhir proses analisis dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi mengenai konstruksi konsep akuntabilitas sebagai hasil kolaborasi konsep *Sustainability Accounting* dan *Sustainable Agriculture* dengan mengacu pada filosofi *Tri Hita Karana* guna mewujudkan *Sustainable Tourism* di Bali.

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi melalui interpretasi hasil konstruksi konsep akuntabilitas pada ITDC. Melalui proses konstruksi, penarikan kesimpulan dan verifikasi nantinya diharapkan dapat terbentuk suatu konsep akuntabilitas berbasis budaya yang bisa mengintegrasikan filsafat, sains, sistem kepercayaan, dengan pemikiran yang lebih selaras dengan budaya, adat istiadat, agama dan sistem sosial masyarakat Bali. Melalui konsep akuntabilitas yang berbasis pada nilai-nilai budaya *Tri Hita Karana* dan konsep pemikiran Permakultur diharapkan entitas wisata di Bali dapat selalu beradaptasi dengan adanya perubahan, sehingga dapat terwujud suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya serta manusia dengan lingkungan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penafsiran Konsep Akuntabilitas pada ITDC

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia. ITDC yang didirikan pada tahun 1972 pada awalnya bernama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) dan dirubah namanya menjadi ITDC sejak 16 Mei 2014. ITDC memiliki visi yaitu "menjadi pengembang destinasi pariwisata kelas dunia". Visi tersebut kemudian diturunkan menjadi misi-misi yang meliputi: (1) mengembangkan destinasi pariwisata terpilih melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat; (2) membentuk sumber daya manusia berkualitas dalam pengelolaan destinasi pariwisata; (3) bersinergi dengan BUMN lain dalam mengembangkan destinasi pariwisata; (4) menjadikan brand equity perusahaan sebagai indikator promosi destinasi pariwisata Indonesia melalui kerja sama dengan institusi internasional.

ITDC menggunakan logo dengan fitur menyerupai burung garuda yang sedang merentangkan sayap sebagai simbol semangat perusahaan untuk terus berkembang. ITDC juga mengusung semboyan "Creating Destinations" sebagai bentuk dukungan terhadap misi perusahaan dalam menciptakan destinasi-destinasi pariwisata baru di Indonesia. ITDC didirikan sesuai rekomendasi pola dasar pengembangan pariwisata Bali sebagai suatu acuan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat Bali serta lingkungan hidupnya. Melalui rekomendasi ini, maka kawasan pantai dan perbukitan Nusa Dua yang memiliki pemandangan alam dengan air laut yang jernih dan pantai berpasir putih yang menghadap ke timur menyongsong matahari terbit dipilih karena memenuhi syarat lahan yang ideal. ITDC telah mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua Bali selama lebih dari 50 tahun, dimana kawasan tersebut merupakan kompleks pariwisata yang sudah mendunia karena banyak terdapat brand perhotelan kelas atas.

The Nusa Dua sebagai kawasan pariwisata yang awalnya merupakan kawasan yang sunyi dan terpencil, di bawah pengelolaan ITDC kawasan tersebut kini telah menjelma menjadi destinasi pariwisata tingkat dunia yang bergengsi dan terbaik pada lingkup internasional. ITDC secara konsisten selalu berpegang pada desain zonasi tata ruang, batasan garis pantai, konsep pertamanan, desain utilitas, dan sistem keamanan dalam pengembangan kawasan pariwisata The Nusa Dua dengan harapan agar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di kawasan wisata dan sekitarnya. Sesuai anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian perusahaan, disebutkan bahwa ITDC didirikan dengan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang pariwisata, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sebagai upaya mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang dilengkapi dengan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa ITDC telah memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari komitmen ITDC terhadap implementasi kolaboratif konsep Sustainability Accounting, dan Sustainable Agriculture sebagai upaya mewujudkan Sustainable Tourism. Terkait implementasi Sustainability Accounting, ITDC telah berhasil meraih berbagai macam penghargaan terkait keberlanjutan antara lain: (1) sebagai penerima Sertifikat ISO 14000:2015 Sistem Manajemen Lingkungan dan Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu terkait sistem pengolahan air limbah yang telah terverifikasi sesuai standar internasional; (2) sebagai peraih TOP CSR Award Bintang 4 dan Top Leader on CSR Commitment tahun 2020 berkat pelaksanaan program CSR, PKBL dan Community Development yang efektif dan berkualitas; (3) sebagai peraih predikat Gold pada BUMN CSR Awards Provinsi Bali pada tahun 2018, 2019, dan 2020 berkat kepedulian terhadap kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat; (4) sebagai peraih predikat Super Platinum dalam Tri Hita Karana (THK) Awards tahun 2016, 2017 dan 2018 yang diselenggarakan oleh Yayasan THK; serta (5) sebagai peraih CSR Award dalam THK Awards tahun 2016 dan 2017, 2018 yang diselenggarakan oleh Yayasan THK.

Komitmen ITDC terkait Sustainable Agriculture ditunjukkan dengan adanya area hijau seluas ± 30 ha (10% dari luas kawasan) yang tersebar di seluruh kawasan The Nusa Dua. Area taman The Nusa Dua ditanami 6.080 pohon, yang terdiri dari berbagai jenis tanaman, termasuk yang berkategori langka sejumlah 2.899 pohon. Pengembangan taman The Nusa Dua mengadopsi konsep Bali yaitu Panca Warna, dimana penanaman pohon diatur sedemikian rupa dengan dominasi warna gelap di sebelah utara, warna putih di sebelah timur, warna merah di sebelah selatan, dan warna kuning di sebelah Barat. Taman The Nusa Dua antara lain berfungsi sebagai tempat konservasi flora atau tanaman lokal, seperti pandan ijo, kayu santen, camplung, bekul, juwet, yang ditanam secara menyebar di seluruh kawasan. ITDC juga berupaya mengelola sampah yang diproses menjadi pupuk organik melalui Unit Komposting guna merawat kesuburan dan keindahan taman The Nusa Dua (AR ITDC, 2023).

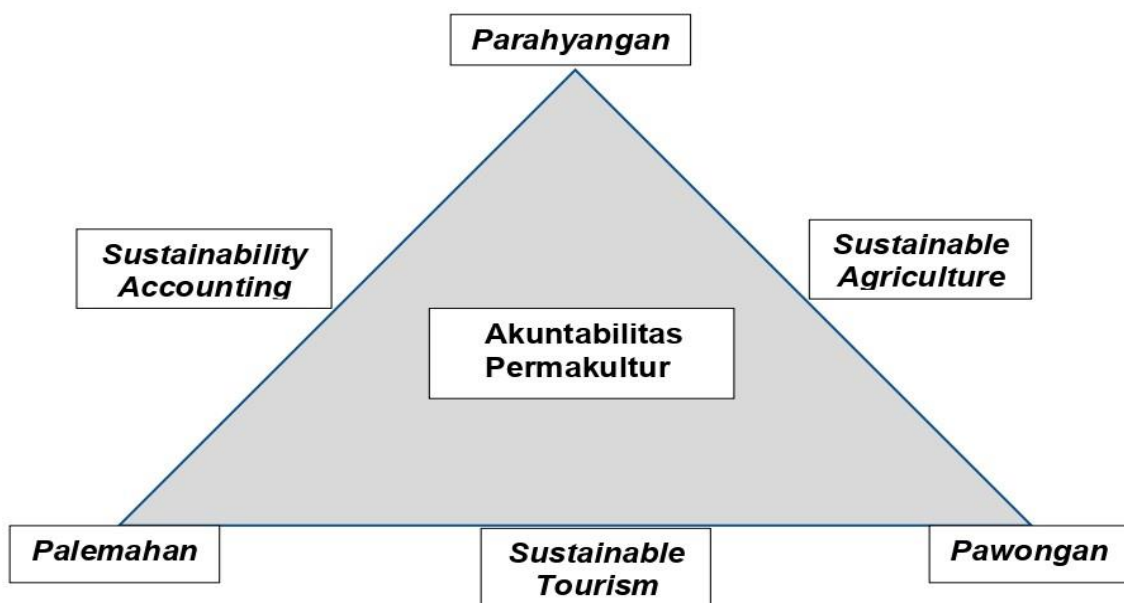
Terkait pencapaian Sustainability Tourism, ITDC telah berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang pariwisata melalui konsep kawasan wisata berwawasan lingkungan, antara lain: (1) sebagai kawasan pariwisata pertama di dunia yang meraih sertifikasi Green Globe 21 Asia Pasific pada tahun 2004 untuk kategori "Community Resort"; (2) sebagai peraih Sertifikat Peringkat Emas Nasional Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Indonesia pada tahun 2009, serta 2022-2025 yang diberikan oleh Indonesia Sustainable Tourism Certification (ISTC); (3) sebagai peraih sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) tahun 2020 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); (4) sebagai peraih Urban Sustainable Tourism Award pada ajang 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018); (5) sebagai peraih Sustainable Tourism Champion pada ajang Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) 2018; serta (6) sebagai peraih Green Platinum dalam Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA 2017) dari Kementerian Pariwisata RI.

3.2. Semiotika Konstruksi Konsep Akuntabilitas Permakultur berbasis Tri Hita Karana

Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab entitas pariwisata Bali terkait dampak yang timbul dari berbagai aktivitas wisata diharapkan dapat berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang berbasis pada filosofi Tri Hita Karana. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tri Hita Karana terdiri dari

dimensi-dimensi yang meliputi: *Parahyangan* (dimensi spiritual/Tuhan), *Pawongan* (dimensi sosial) dan *Palemahan* (dimensi lingkungan). Penelusuran semiotik dalam dimensi *Parahyangan*, menunjukkan bahwa ITDC telah menunjukkan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Manusia secara ontologis, pada dasarnya memang bersumber dari Tuhan dan pada saatnya akan kembali kepada Tuhan, sehingga manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah sepatutnya memperoleh kesadaran ketuhanannya (Triyuwono, 2015). Penelusuran semiotik dalam dimensi *Pawongan*, menunjukkan bahwa ITDC telah menunjukkan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama manusia guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Penelusuran semiotik dalam dimensi *Palemahan*, menunjukkan bahwa ITDC telah menunjukkan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungan melalui program-program yang dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam Bali.

Penelitian ini berupaya melakukan konstruksi konsep akuntabilitas yang berbasis pada filosofi Tri Hita Karana dengan menyeimbangkan dimensi spiritual (*Parahyangan*), dimensi sosial (*Pawongan*), dan dimensi lingkungan (*Palemahan*) melalui kolaborasi konsep *Sustainability Accounting*, dan *Sustainable Agriculture*, guna mewujudkan *Sustainable Tourism*. Ketiga dimensi *Tri Hita Karana* harus selalu dijaga agar seimbang dan harmonis. Berdasarkan hasil analisis Semiotika-Konstruktif, penelitian ini berhasil mengkonstruksi suatu konsep akuntabilitas yang disebut sebagai Akuntabilitas Permakultur. Konsep Akuntabilitas yang terkonstruksi melalui proses Semiotika-Konstruktif disebut sebagai Akuntabilitas Permakultur karena didasari oleh konsep pemikiran permakultur yang memandang bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan atau organisasi yang selalu berupaya menciptakan suatu kehidupan yang seimbang dan tidak merusak tatanan alam sehingga sustainability kehidupan manusia tetap terjaga. Melalui konstruksi Akuntabilitas Permakultur, diharapkan ITDC dan entitas pariwisata lainnya di Bali yang memiliki karakteristik yang sama dapat berperan dalam pemanfaatan sumber-sumber daya pariwisata Bali secara adil dan bijaksana untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Adapun gambaran hasil konstruksi konsep Akuntabilitas Permakultur disajikan pada Gambar 2, berikut:



Gambar 2. Konstruksi Konsep Akuntabilitas Permakultur

Sumber: Hasil Sintesa Pemikiran Informan dan Peneliti

Konstruksi Akuntabilitas Permakultur adalah sebagai jawaban atas kritik terhadap konsep Akuntabilitas Konvensional berbasis “*Triple Bottom Line*” dan “*Pentuple Bottom Line*” yang walaupun sudah menampilkan berbagai dimensi keberlanjutan, namun masih mengandung value kapitalisme, neo-liberalisme serta neo-kolonialisme, karena hanya mengakomodir kepentingan

stakeholder yang terikat dalam suatu hubungan kontraktual. Dikatakan demikian karena, keberadaan Akuntabilitas Konvensional masih didasari oleh konsep pemikiran Monokultur yang memungkinkan adanya potensi terjadinya eksploitasi tanpa mempedulikan keseimbangan dan keharmonisan suatu sistem kehidupan. Berbeda dengan konsep Akuntabilitas Konvensional, Akuntabilitas Permakultur yang dikonstruksi dengan mengacu pada konsep pemikiran permakultur akan bisa menggambarkan upaya yang dilakukan oleh suatu entitas dalam menjaga suatu sistem kehidupan agar tetap seimbang dan harmonis secara berkelanjutan. Keberadaan konsep Akuntabilitas Permakultur sebagai konsep baru diharapkan dapat menjadi suatu konsep yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia selaras dengan kelestarian lingkungan alam. Akuntabilitas Permakultur jika dilihat dalam konteks pariwisata Bali, dipandang dapat menjaga harmonisasi alam dan manusia secara seimbang dan berkelanjutan yang juga berarti menjaga nilai-nilai budaya setempat yang dipercaya dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan.

4. Simpulan

Penelitian ini mengkritisi konsep Akuntabilitas Konvensional berbasis “*Triple Bottom Line*” dan “*Pentuple Bottom Line*”, karena masih mengandung *value* kapitalisme, neo-liberalisme serta neo-kolonialisme serta hubungan kontraktual sehingga dinilai hanya bisa mengakomodir kepentingan *stakeholder* yang ada di dalam kontrak. Tujuan penelitian ini adalah berupaya mengkonstruksi suatu konsep akuntabilitas melalui kolaborasi konsep *Sustainability Accounting*, *Sustainable Agriculture* guna menuju *Sustainable Tourism* di Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan paradigma *beyond* posmodernisme yang melampaui dekonstruksi Derrida dengan berpijak pada nilai-nilai yang berasal dari filosofi *Tri Hita Karana* agar sesuai dengan karakteristik pariwisata Bali. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder berupa informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan ITDC dan Laporan PKBL ITDC tahun 2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan analisis data model interaktif dalam penelitian kualitatif [Miles, & Huberman, 1994] menggunakan metode Semiotika-Konstruktif seperti yang dilakukan oleh Riduwan et.al, (2010).

Penelitian ini menemukan bahwa ITDC telah memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep akuntabilitas yang dapat dilihat dari komitmen ITDC terhadap implementasi kolaboratif konsep *Sustainability Accounting*, dan *Sustainable Agriculture* guna mewujudkan *Sustainable Tourism*. Pemahaman yang memadai terkait akuntabilitas selanjutnya dikonstruksikan menjadi suatu konsep akuntabilitas yang baru melalui proses Semiotika-Konstruktif sehingga menghasilkan suatu konsep akuntabilitas yang disebut Akuntabilitas Permakultur. Konstruksi konsep Akuntabilitas Permakultur ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi ITDC dan entitas wisata lainnya di Bali yang memiliki karakteristik yang sama dalam mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas wisata secara lebih holistik guna menjaga kelangsungan hidup manusia, nilai-nilai budaya setempat selaras dengan kelestarian lingkungan alam. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu konsep Akuntabilitas Permakultur mungkin hanya sesuai diterapkan pada ITDC dan entitas wisata lainnya di Bali dengan karakteristik yang sama. Penelitian selanjutnya yang ingin mengelaborasi lebih lanjut terkait konsep akuntabilitas disarankan untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian jika konsep akuntabilitas diterapkan di daerah lain dengan budaya dan filosofi hidup yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Aleksandrova-Zlatanska, S., Ivanov, B., Ivanova, M., & Dimitrova, D. (2025). Green Deal in Agriculture Through the Sights of Researches. *Ikonomicheski Izsledovania*, 34(1), 156–173.
- Ardiana, P. A. (2023). Stakeholder engagement in sustainability reporting by Fortune Global 500 companies: a call for embeddedness. *Meditari Accountancy Research*, 31(2), 344–365. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-12-2019-0666>
- Bagiada, I. M., Artawan, P. D., & Wahyuni, L. M. (2025). Pengaruh Akuntansi Hijau dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Periode

- 2020-2023 *The Effect of Green Accounting and the Implementation of Corporate Social Responsibility*. 27(1), 180-188.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395-413. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- CNNIndonesia. (2024, November). *Bali Masuk Tempat Wisata yang tak Layak Dikunjungi di 2025*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241123055643-269-1169762/bali-masuk-tempat-wisata-yang-tak-layak-dikunjungi-di-2025>
- Dewi, I. G. A. A. ., Sukoharsono, E. G., Purwanti, L., & Mulawarman, A. D. (2022). *THE HOLISTIC HAPPINESS THEORY: ESTABLISHING A NEW THEORY FOR TRI HITA KARANA BASED-SUSTAINABLE FINANCE*. 3(November).
- Dewi, I. G. A. A. O. (2010). Dialektika Dan Refleksi Kritis Realitas “Sustainability” Dalam Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermasian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 139-152. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.08>
- Dewi, I. G. A. A. O. (2021). Religious-Ecocentrism Sustainability Accounting: Beyond Utopia towards Universe Sustainability. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 3(1), 81-98. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2021.04.06>
- Dewi, I. G. A. A. O. (2025). *Construction of Sustainability Accounting: Rwa-Bhineda Stylistics Based on The True Happiness Pyramid*. Brawijaya.
- Elkington, J. (1998). Accounting for the Triple Bottom Line. *Measuring Business Excellence*, 2(3), 18-22.
- Gelfand, M. J., Lim, B. C., & Raver, J. L. (2004). Culture and accountability in organizations: Variations in forms of social control across cultures. *Human Resource Management Review*, 14(1), 135-160. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.007>
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability...and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47-62. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.006>
- Gray, R., Bebbington, J., & Collison, D. (2006). NGOs, civil society and accountability: Making the people accountable to capital. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 19(3), 319-348. <https://doi.org/10.1108/09513570610670325>
- Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? *Tourism Management Perspectives*, 25, 157-160. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.017>
- Hirakawa, S., Masuyama, H., Sudiarta, I. P., Suprpta, D. N., & Shiotsu, F. (2024). Initiatives and Prospects for Sustainable Agricultural Production in Karangasem Regency, Bali, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 16(2), 1-14. <https://doi.org/10.3390/su16020517>
- Jaremen, D. E. zbieta, Nawrocka, E. zbieta, & Zemła, M. (2019). Sharing the economy in tourism and sustainable city development in the light of agenda 2030. *Economies*, 7(4), 1-15. <https://doi.org/10.3390/economies7040109>
- Kamayanti, A. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan*. (E. . Rasyid (ed.); Revisi). Peneleh.
- Karubanga, G., Godfrey Agea, J., Tatenda Rugare, J., & Mubangizi, N. (2024). Leveraging video integration for enhanced agricultural extension reforms in Uganda. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2399936>
- Lamberton, G. (2005). Sustainability accounting - A brief history and conceptual framework. *Accounting Forum*, 29(1), 7-26. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.11.001>
- Lehman, G. (2005). A critical perspective on the harmonisation of accounting in a globalising world. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(7), 975-992. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.06.004>
- Miles, M. B. dan Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Ltd.
- Mulawarman, A. D. (2013). Nyanyian Metodologi Akuntansi ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa “Sendiri.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(April). <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7189>

- Mulawarman, A. D. (2019). Tazkiyah: Metodologi Rekonstruksi Akuntansi Pertanian. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4656>
- Mulawarman, A. D. (2021). Paradigma Nusantara: Decolonizing Science Agenda. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 3(2), 99–122. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2021.09.01>
- Rahman, A. N., & Kusumawardani, A. (2025). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan The Effect of Green Accounting Implementation and Environmental Performance on Financial Performance. 27(1), 145–153.
- Ridwan, A. I. T. G. I. U. L. (2010). SEMIOTIKA LABA AKUNTANSI : STUDI KRITIKAL-POSTMODERNIS DERRIDEAN Iwan Triyuwono Gugus Irianto Unti Ludigdo. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 38–60.
- Rosenau, P. M. (1992). *Post-Modernism and The Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*. Princeton University Press.
- Shereni, N. C. (2019). The tourism sharing economy and sustainability in developing countries: Contribution to SDGs in the hospitality sector. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(5), 1–10.
- Sudana, I. P., Sukoharsono, E. G., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2014). A Philosophical Thought on Sustainability Accounting. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(9), 1–10.
- Sukoharsono, E. G. (2018). Strategies To Improve the Sustainability in Promoting Transparency, Accountability and Anti-Corruption: an Imaginary Dialogue. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 26(1), 39–54. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2018.26.1.3>
- Sukoharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan (Pertama)*. UB Press.
- Sukoharsono, E. G., Widhianingrum, P., & Smith Purba, A. (2021). Constructing a Hierarchical Pyramid of Corporate Social Responsibility: a Model From Legal and Economic To Spiritual Obligation. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(1), 169–196. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2021.29.1.8>
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- Syah, S., Saraswati, E., & Sukoharsono, E. G. (2020). Blue Accounting and Sustainability. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 144(Afbe 2019), 502–508.
- Triyuwono, I. (2000). Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 4(1), 1–34.
- Triyuwono, I. (2015). Awakening the conscience inside : the spirituality of code of ethics for professional accountants. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 254–261. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.362>
- Triyuwono, I. (2016). Social Sciences and Humanities Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consciousness. *Pertanika*, 24, 89–104.
- Velten, S., Leventon, J., Jager, N., & Newig, J. (2015). What is sustainable agriculture? A systematic review. *Sustainability (Switzerland)*, 7(6), 7833–7865. <https://doi.org/10.3390/su7067833>
- Wiana, K. (2007). *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Paramitha.
- Windia, W. (2006). Transformasi Sistem Irigasi Subak yang Berlandaskan Tri Hita Karana. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/download/4078/3067>
- Wiriatmaja, N. U., Wibowo, A. S., & Setiawan, R. Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas Perusahaan , Sales Growth , dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak The Effect of Corporate Profitability , Sales Growth , and Corporate Social Responsibility (CSR) on Tax Aggressiveness. 26(4), 766–778.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14, 2002070 (2016).
- Weaver, D. B. (2006). *Sustainable tourism: Theory and practice*. Burlington, MA: Routledge.
- Wiana, I Ketut. (2007). *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.